



Perkembangan Ilmu Komunikasi di Indonesia: Instrumentalisasi Kuasa Hingga Mekanisme Pasar¹

Justito Adiprasetyo²

Abstraksi

Jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, pada dasarnya memberikan berbagai harapan bagi Ilmu Sosial di Indonesia. Namun, harapan ini cenderung tumpul dalam menghadapi Ilmu Komunikasi. Mengutip Rahardjo (2012), komunikasi sering hanya dianggap sebagai studi teoritis yang organisasinya memiliki orientasi untuk menghasilkan lulusan yang cepat terserap oleh pasar. Artikel ini adalah upaya untuk menemukan cara untuk pengembangan Ilmu Komunikasi, dengan upaya untuk mengisi ketiadaan studi terkait dengan metamorfosis Ilmu Komunikasi, sehingga artikel ini disusun untuk menunjukkan kontinuitas dan diskontinuitas wacana Ilmu Komunikasi selama Orde Baru hingga Pasca Orde Baru. Beberapa temuan dalam penelitian ini diharapkan berkontribusi pada gagasan pengembangan studi Ilmu Komunikasi itu sendiri. Artikel ini juga bertujuan untuk melanjutkan proyek yang sebelumnya dilakukan oleh Dhakidae (2003), Heryanto (2004), Haryanto (2008), Samuel (2010), untuk menunjukkan praktik kekuasaan dan pembentukan diskursif ilmu sosial di Indonesia.

Kata kunci: ilmu komunikasi, praktik kuasa, Orde Baru, pasca Orde Baru, praktik diskursif ilmu sosial

Abstract

The fall of the New Order in 1998, basically provided various hopes for the social sciences in Indonesia. However, these hopes tend to be blunt in the face of Communication Science. Quoting Rahardjo's (2012), communication is often only regarded as a theoretical study which its scientific organizers have the orientation to produce graduates who are quickly absorbed by the market. This article is an attempt to find a way for the development of Communication Science, with an effort to fill the absence of the study related to the metamorphosis of Communication Science, so this article was arranged far to show continuity and discontinuity of Communication Science discourse during the New Order to Post New Order. Some findings in this study are expected to contribute to the idea of the development of the study of Communication Science itself. This article also aims to continue the project that was previously carried out by Dhakidae (2003), Heryanto (2004), Haryanto (2008), Samuel (2010), to show the power practices and discursive formation of social science in Indonesia.

Keywords: communication science, power practices, new order, post new order, social science discursive practices

A. Pengantar

Komunikasi adalah salah satu ilmu sosial yang dalam dua dasawarsa ini begitu meningkat popularitasnya di Indonesia. Indikasinya adalah makin banyaknya program-program pendidikan yang menawarkan Ilmu Komunikasi, termasuk kajian-kajian yang dianggap sebagai terapannya; Jurnalisme; Komunikasi Massa, Hubungan Masyarakat, Manajemen Komunikasi dst,

diselenggarakan oleh berbagai perguruan tinggi, negeri maupun swasta. Menurut catatan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) sebelum tahun 1998, terdapat 24 institusi penyelenggara program studi atau jurusan Ilmu Komunikasi yang berada di bawah naungan perguruan tinggi (Sendjaja, 2006). Pasca 1998, jumlah tersebut berlipat dengan sangat signifikan, berdasarkan data Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri (EPSBED) November Tahun 2009, berjumlah lebih dari 199 di berbagai

¹Untuk kutipan atau sitasi artikel ini: Adiprasetyo, Justito. 2019. "Perkembangan Ilmu Komunikasi di Indonesia: Instrumentalisasi Kuasa dan Mekanisme Pasar." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Vol 6 (2): 124-149.

²Departemen Komunikasi Massa, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Kontak: justito.adiprasetyo@unpad.ac.id

perguruan tinggi di Indonesia (Kuswarno, 2010). Hingga tahun 2017, terdapat 218 program studi Ilmu Komunikasi yang sudah terakreditasi (Badan Akreditasi Nasional per 2017). Sayangnya, peningkatan jumlah penyelenggara pendidikan Ilmu Komunikasi dalam dua dasawarsa tersebut, ternyata tidaklah selaras dengan perkembangan epistemologi Ilmu Komunikasi itu sendiri. Ilmu Komunikasi yang diskursus epistemologinya pertamakali dikibarkan pada tahun 1974 masih terlihat, meminjam istilah Turnomo Rahardjo, “seragam”. Rahardjo misalnya membandingkan bidang-bidang yang menjadi konsentrasi Ilmu Komunikasi di Indonesia dengan ranah sub disiplin komunikasi yang dibakukan oleh *International Communication Association* (ICA) dan *National Communication Association* (NCA) (Rahardjo dalam Budi, 2012).

Ilmu Komunikasi terlanjur identik dengan Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Periklanan, Penyiaran dan Manajemen Komunikasi, bidang-bidang yang sifatnya terapan, dan cenderung kurang mengakomodir kajian teoritik dalam posisinya sebagai sebuah disiplin ilmu, yang semestinya memiliki horizon yang luas, dan memiliki keterkaitan dengan cabang epistemologi yang lain. Dirjen Dikti sendiri dalam Lampiran Surat No. 1030/D.T/2010, menetapkan sebagai berikut: Bidang Ilmu Komunikasi, dengan Program Studi: (1) Ilmu Komunikasi, (2) Jurnalistik, (3) Hubungan Masyarakat, (4) Periklanan, (5) Televisi dan Film, (6) Manajemen Komunikasi dan Media. Perguruan Tinggi penyelenggara program studi Ilmu Komunikasi, cenderung hanya berposisi sebagai pabrik, yang memiliki tugas untuk menciptakan

tenaga-tenaga kerja terampil sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pasar (Rahardjo dalam Budi, 2012: 12-13).

Keseragaman dalam mengidentifikasi “apa itu Ilmu Komunikasi?” tidak hanya terdapat di perguruan tinggi-tinggi yang baru menyelenggarakan program studi Ilmu Komunikasi, namun juga terjadi di institusi yang sudah berusia dan telah menjadi aparat otoritas Ilmu Komunikasi itu sendiri. Salah satunya adalah Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran (Fikom Unpad). Sebagai salah seorang pengajar-nya, saya bisa bercerita bahwa Fakultas Ilmu Komunikasi tertua di Indonesia (55 tahun - 2015), Fikom Unpad adalah salah satu tujuan favorit pembelajar Ilmu Komunikasi di Indonesia. Bahkan, sebagian menyebut Fikom Unpad sebagai “kiblat-nya” Ilmu Komunikasi di Indonesia (Mulyana, 2010: 2). Fikom dalam posisi tersebut, tentu saja, mendapatkan bentuk populerisme tersendiri di mata pemerhati dan peneliti dalam bidang Ilmu Komunikasi. Namun, apabila Fikom Unpad benar-benar menjadi *Mekkah-nya* Ilmu Komunikasi di Indonesia, barang tentu Ilmu Komunikasi di sana akan diletakkan sebagai sebuah kajian epistemologi yang ketat. Sayangnya tidak demikian adanya, pengkajian Ilmu Komunikasi di Fikom Unpad disinyalir gagal memasukkan perspektif-perspektif revolusioner dalam kurikulum kesarjanaannya. Indikasinya adalah absennya berbagai pendekatan ‘kritis’ dalam pengkajian Ilmu Komunikasi. Sangat sedikit materi yang membahas perspektif komunikasi dalam bingkai Marxisme, kajian Pascakolonial, *Cultural Studies*, misalnya. Hal yang mudah saja kita deteksi dari kurikulum yang berlaku di Fikom Unpad, juga

buku-buku yang dijadikan sebagai buku pegangan dalam pengajaran.

Gejala absennya kajian-kajian 'kritis' dalam Ilmu Komunikasi sendiri menyiratkan keberadaan praktik kuasa. Dapat diidentifikasi terjadi pemilahan mana fokus kajian yang dapat dan kemudian masuk dalam tema 'normal' dalam Ilmu Komunikasi, dan mana yang tidak. Haryanto (2008) misalnya memberi catatan bahwa selama ini Ilmu Komunikasi di Indonesia sulit sekali mendapatkan corak kiri dalam perspektif keilmuannya. Reproduksi pengetahuan yang dilakukan oleh aparatur- aparatur pengetahuan Ilmu Komunikasi memiliki tembok-tembok yang sulit ditembus oleh kajian dengan epistemologi kiri. Salah satu penyebabnya ditengarai beberapa pihak disebabkan Ilmu Komunikasi terlalu lama terjebak dalam rezim pengetahuan 'pembangunanisme' Orde Baru. Rezim ekonomi yang menundukkan dunia intelektual di Indonesia selama beberapa puluh tahun, di mana Ilmu Komunikasi juga menjadi salah satu cabang ilmu sosial yang terjajah, dan digunakan Orde Baru sebagai salah satu instrumen otoritasnya (Dhakidae, 2003: 330-354).

Pada masa Orde Baru kreativitas Ilmu Komunikasi dibelenggu dan hanya dianggap sebagai roda kecil dari 'lokomotif' pembangunan. Kajian-kajian Ilmu Komunikasi yang dikembangkan pada masa Orde Baru, serupa dengan ilmu sosial lainnya, dibatasi hanya pada kajian yang dianggap berguna untuk pembangunan. Ilmu Komunikasi menjadi ilmu yang sangat instrumental (Sudibyo dalam Prajarto [ed], 2004: 69).

Bila kita melempar pandangan ke belakang, kita dapat melihat pada medio 1970-an, Astrid S.

Susanto, seorang sarjana awal Ilmu Komunikasi Indonesia, sepulangnya dari Jerman Barat, mesti tunduk pada pragmatisme doktrin pembangunan Orde Baru. Hal tersebut dapat dilihat dari sub-bab "Masalah Perencanaan Komunikasi: kasus Indonesia," yang termuat dalam buku *Komunikasi Kontemporer* yang ditulis Astrid. Buku Astrid tersebut terbit pada tahun 1977. Nafas 'pembangunanisme' yang diusung oleh Astrid terasa pekat dengan membawa bagian pembahasan di dalamnya yaitu; 'Perencanaan Komunikasi di Indonesia', 'Perencana Pembangunan di Indonesia', 'Komunikasi Pembangunan', 'Pembangunan Media Massa di Indonesia', 'Merencanakan Komunikasi ke Atas'. Bagian yang menunjukkan bahwa pengaruh Orde Baru dan 'pembangunanisme'-nya dalam iklim akademik Ilmu Komunikasi sangat kuat. Kajian dalam disiplin Ilmu Komunikasi yang dianggap kontemporer dan dianggap mendesak pada saat itu adalah "Komunikasi Pembangunan", komunikasi yang menunjang proyek 'pembangunanisme.' Ilmu Komunikasi, pada saat itu, berada dalam jeruji yang sama, bersama ilmu-ilmu sosial lain, ia dipaksa untuk melayani program negara dan hanya menyisakan sedikit kritisisme belaka.

Puing-puing masa lalu tersebut yang ternyata masih bertahan hingga saat ini, bahkan ketika Orde Baru dan 'pembangunanisme'-nya coba dirubuhkan oleh reformasi 1998. Bertahannya mata kuliah "Komunikasi Pembangunan" dan "Sistem Komunikasi Indonesia" di beberapa perguruan tinggi menunjukkan hal tersebut, mata kuliah yang mengajarkan dan mengimajinasikan bahwa Indonesia memiliki satu sistem raksasa – Sistem Komunikasi Indonesia –, dan seolah abai pada

multikulturalisme - pluralisme, dalam kurikulum pengajaran di banyak program studi Ilmu Komunikasi di Indonesia adalah wujud praktik diskursif dari Ide yang ditelurkan oleh Astrid dalam karyanya. Hal yang pada awalnya adalah mata kuliah 'pesanan' Orde Baru, melalui kesepakatan dalam rangka menanamkan pengetahuan tentang 'nasion' ternyata masih tetap dipertahankan hingga saat ini, belasan tahun setelah Orde Baru tersebut gulung tikar (Nugroho, 2006).

Ilmu Komunikasi sebagai bagian dari ilmu-ilmu sosial yang dikembangkan Orde Baru pada perkembangan praktiknya tak hanya menyokong pembangunanisme tetapi juga meneguhkan teknokratisisme. Di mana akademisi berusaha diolah untuk kemudian menjadi tenaga terlatih yang akan bekerja di bidang komunikasi. Pada masa Orde baru, Ilmu Komunikasi - setelah berganti nama dari Ilmu Publisistik pada tahun 1982- menjadi pemasok utama pegawai-pegawai Departemen Penerangan dengan adanya jurusan "penerangan" di sana. Sedangkan sisanya diarahkan guna melayani kebutuhan tenaga kerja di industri media, juga di bidang hubungan masyarakat yang sedang menggeliat berbarengan dengan kemajuan industri (Badjari, 2010: 14). Semangat dalam pengajaran 'pembangunanisme' (sebagai bentuk modernisme hasil dari proyek pencerahan); universalitas, netralitas, objektivitas masih tetap dipertahankan sebagai abstraksi dalam dunia ilmu dan pengetahuan, tetapi dalam praktiknya, penelitian-penelitian dalam kajian-kajian Ilmu Komunikasi tetap dibatasi dan ditundukkan oleh kewajiban mengabdikan pada kepentingan dan martabat pihak penguasa politik dan ekonomi sebagai sponsor ilmu

dan penelitian (Heryanto dalam Dhakidae dan Hadiz, 2006: 73). Instrumentalisasi Ilmu Komunikasi sebagai bagian dari alat otoritas Orde Baru, dapat terlihat secara eksplisit dari judul-judul penelitian yang dilaksanakan oleh berbagai institusi, perguruan tinggi negeri maupun swasta maupun Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI). Sumber biaya penelitian-penelitian Ilmu Komunikasi pada masa Orde Baru sendiri sebagian besar berasal dari kantong negara.

Transisi politik pada tahun 1998, menunjukkan bahwa berakhirnya Orde Baru tidak lantas mengakhiri apa yang disebut teknokratisisme yang sebelumnya menjadi *zeitgeist* pemerintahan Orde Baru. Perkembangan Ilmu Komunikasi yang seharusnya bisa mengalami transisi dari 'ilmu sosial teknis' menjadi 'ilmu sosial kritis' karena lenyapnya otoritas negara yang represif, namun ternyata peralihannya terasa sangat lamban. Perbedaannya, sebelum dan sesudah era Orde Baru adalah apabila dulu Orde Baru yang memiliki otoritas yang hampir penuh terhadap kajian apa yang harus dikembangkan oleh institusi-institusi yang mengibarkan bendera keilmuan Ilmu Komunikasi, kini kuasa tersebut dilimpahkan ke pasar. Pasar, yang kemudian menentukan spesifikasi macam apa yang harus dimiliki oleh seorang sarjana Ilmu Komunikasi.

B. Metodologi: Proposisi dan Usaha Merevisi

Kajian perihal relasi ilmu sosial dan relasi antara ilmu-ilmu sosial di Indonesia dengan kekuasaan - atau lebih umum, antara 'pengetahuan' dan kekuasaan, kuasa/pengetahuan (Foucault,

1972) - bukanlah sesuatu yang sama sekali baru. Hal yang sebelumnya pernah dibahas oleh tak sedikit pemikir, sebut saja Haryanto (2008), Dhakidae (2003), Heryanto (2004), Samuel (2010). Artikel ini memiliki tujuan untuk melanjutkan proyek-proyek tersebut, yaitu menunjukkan praktik kuasa, dan formasi diskursif yang menyusunnya, serta implikasinya terhadap pengkajian komunikasi itu sendiri, lebih jauh bagaimana keterkaitannya dengan kondisi sosial dan politik di mana ilmu atau pengetahuan menjadi bagian dari *episteme* yang bekerja.

Praktik-praktik kuasa yang kemudian ditengarai menjadi penyebab Ilmu Komunikasi hanya dianggap sebagai ilmu yang instrumental belaka, serta terjadinya stagnasi serta menciptakan perspektif yang otoriter dalam pengkajian dan Ilmu Komunikasi Indonesia. Hal yang membuat minimnya (atau bahkan tidak) dimasukkannya teoritisasi dengan berbagai latar seperti pendekatan Pascakolonial, Marxisme, *Cultural Studies* dll, dalam berbagai kurikulum studi komunikasi. Praktik kuasa yang membuat penelitian yang berperspektif *critical history* dalam membedah bagaimana asal usul kelahiran Ilmu Komunikasi dan lebih jauh, asal mula pengkajian dan Ilmu Komunikasi di Indonesia nyaris selalu absen dalam peta penelitian di Indonesia. Kekosongan yang ingin coba diisi oleh artikel ini.

Saat membaca uraian awal latar belakang tulisan sebelumnya, pemerhati dan peneliti di bidang komunikasi tentu akan teringat pada dua karya. Pertama, adalah artikel Ignatius Haryanto yang berjudul *Propaganda, Kuasa dan Pengetahuan* (2008). Artikel ini salah satunya bertujuan untuk melanjutkan sekaligus mengoreksi beberapa

standing point serta *thesis* yang telah diformulasikan dalam artikel tersebut. Ignatius menjelaskan bahwa Ilmu Komunikasi menjadi bagian dari “Ideologi Negara Orde Baru yang dikembangkan guna menyukseskan program-program pemerintah untuk mendapatkan stabilitas ekonomi, pengendalian jumlah penduduk lewat program Keluarga Berencana (KB), rekayasa sosial (*social engineering*) kepada masyarakat dengan berbagai program pembangunan.” Paparan Ignatius, sejalan dengan penjelasan Ignas Kleden, seorang sosiolog UI yang memberikan gambaran perihal peran dan sifat ilmu sosial pada masa Orde Baru hingga dekade 1980-an. Bagi Kleden, ilmu sosial saat itu berperan sebagai alat rekayasa sosial – mulai dari sektor politik, pendidikan, budaya, hukum hingga moralitas (Kleden, 1986: 7-9). Namun dalam pembahasan makalahnya, Ignatius, tidaklah gamblang dalam memberikan deskripsi perihal fakta kesejarahan, bagaimana relasi Ilmu Komunikasi dengan *state*, sebagai mesin pengaturan dan keterkaitannya dengan Departemen Penerangan. Departemen yang kemudian berperan dalam pengembangan Ilmu Penerangan, sebelum kemudian diubah menjadi Ilmu Komunikasi. Selain itu, saya juga akan mengkritik argumentasi Ignatius perihal tidak masuknya Marxisme dalam kajian komunikasi yang membuat perkembangannya menjadi mandul. Hal yang didapatkan Ignatius dari paparan Hilmar Farid dalam “Masalah Kelas dalam Ilmu Sosial di Indonesia” (Farid dalam Dhakidae dan Hadiz, 2006). Namun terdapat pertanyaan yang dapat kita ajukan ‘mengapa hanya Ilmu Komunikasi yang mengalami gejala kemandulan yang kronis dalam hal dominasi perspektif?’ – dalam kecurigaan Ignatius adalah soal dominasi terhadap kajian positivisme, bagaimana

Sosiologi maupun Antropologi yang saat ini setidaknya sudah mulai memasukkan berbagai perspektif Marxian dalam kurikulumnya juga mengalami represi yang serupa pada masa Orde Baru. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya dalam konteks represi Orde Baru titik tolak utamanya. Walaupun benar bahwa analisis kelas kerap kali absen dalam kerangka analisis sosial – juga komunikasi – karena para sarjana di zaman Orde Baru –termasuk sarjana Ilmu Komunikasi – terlalu sibuk membahas perkembangan politik parlemen, partai politik dan birokrasi pemerintah. Buruh, petani, pengangguran, kelas menengah perkotaan hingga pemilik kapital hanya sesekali tampil dalam analisis sosial dan didefinisikan sebagai ‘massa’ (Levine, 1969; Farid dalam Dhakidae dan Hadiz, 2006: 187). Namun, keseragaman - dalam istilah Rahardjo (2012) - atau dominasi perspektif tersebut, muncul karena peralihan dari otoritarianisme Orde Baru menuju reformasi, dan sekarang *post-reformasi* tidak menampilkan hasil yang signifikan. Hal tersebut saya curigai, karena apabila pada masa Orde Baru, Ilmu Komunikasi (dan Ilmu Penerangan sebagai pendahulu sekaligus berelasi inheren dengan Ilmu Komunikasi) adalah pengabdian ‘pembangunanisme’ Orde Baru, lebih spesifiknya, sebagai ilmu yang melayani Departemen Penerangan. Maka pasca-reformasi, yang terjadi adalah Ilmu Komunikasi tetap tidak mekar sebagai sebuah disiplin ilmu yang memiliki kajian teoretik yang mumpuni dan horizon yang luas, namun lebih menjadi mesin pelayan pasar, di mana lulusan-lulusan Ilmu Komunikasi sesuai spesifikasinya akan berusaha dibentuk untuk sekedar memenuhi *slot-slot* kebutuhan industri.

Kedua, kita akan dengan mudah mengingat karya berjudul *Matinya Ilmu Komunikasi* (2006) yang ditulis oleh Sri Guntur Narwaya, buku yang mengulas perihal berbahayanya dominasi paradigma dalam Ilmu Komunikasi. Narwaya tidak banyak membahas perihal data-data dan bagaimana fakta kesejarahan, dalam konteks ini, paparan perihal formasi diskursif yang berada di belakang diskursus Ilmu Komunikasi. Narwaya terlalu bersemangat menuding positivisme sebagai paradigma yang menjadi biang masalah stagnasi perkembangan Ilmu Komunikasi, namun tidak membeberkan perihal kondisi apa saja yang memungkinkan positivisme yang terlampaui naif tersebut dapat tumbuh dengan subur. Kelemahan karya Narwaya tersebut, juga akan coba digenapi dalam tulisan ini. Pada akhirnya tujuan mendasar yang hendak dielaborasi melalui tulisan ini adalah, Untuk mengetahui kontinuitas dan diskontinuitas praktik dominasi pengetahuan yang bekerja dalam historisitas pengkajian dan Ilmu Komunikasi di Indonesia.

C. Teknokratisisme Orde Baru dan Ilmu Komunikasi

Insiden Gerakan Satu Oktober 1965 (Gestok) merupakan penanda berdirinya rezim kuasa baru di Indonesia, Orde Baru. Terdapat berbagai macam skenario terkait insiden yang terjadi di sekitar tanggal 30 September hingga 1 Oktober tersebut. Rezim Orde Baru yang berkuasa setelahnya, menuding PKI adalah dalang utama terjadinya peristiwa tersebut, dimulai dari penculikan dan pembunuhan perwira-perwira tinggi militer, lalu mayat mereka dimasukkan ke dalam lubang di

Jakarta Timur, yang kemudian dikenal dengan nama Lubang Buaya. Argumen resmi Orde Baru ditulis oleh sejarawan Nugroho Notosusanto (1965) bahwa PKI adalah pelaku utama percobaan pengambil alihan kekuasaan. Namun beberapa versi lain, menyebutkan insiden tersebut, hanyalah merupakan skenario Soeharto untuk mendapatkan kekuasaan dan melengserkan Soekarno, presiden pertama Indonesia (Herlambang, 2013).

Beberapa karya lain yang ditulis Indonesianis menunjukkan apa yang terjadi pada tahun 1965 merupakan suatu bentuk jalin-jemalin konflik politik yang kompleks. Indonesianis seperti Ben Anderson dan Ruth McVey (1971), WF. Wertheim (1970), Peter Dale Scott (1985), John Roosa (2000) dalam karya-karyanya menunjukkan hal tersebut. Lepas dari berbagai versi yang kemudian menjadi persengketaan, peristiwa tersebut menjadi pintu masuk Indonesia mengadopsi pendekatan teknokratisisme dengan logat militeristik Jawa dalam model kekuasaannya (Heryanto, 2006)

Aspek teknokratik kekuasaan Orde Baru dapat dengan mudah dideteksi dengan banyaknya para "ahli" di berbagai bidang ilmu diangkat menjadi birokrat negara, apakah sebagai birokrat penasehat (Soedjatmoko, Soelaiman Soemardi, Harsja Bactiar, dll) atau pula sebagai birokrat tulen. Terjadi proses integrasi antara para akademisi dan dunia birokrasi. Hal yang membuat orientasi ilmu sosial menjadi sangat terpengaruh oleh kebutuhan birokrasi. Keadaan ini tercermin pada perjalanan karir sejumlah akademisi. Ilmuan sosial bisa duduk di puncak bidangnya dan menjadi figur yang tersohor pada disiplin ilmunya bukan semata-mata karena

mutu karyanya, eksplorasi, temuan barunya, namun secara nepotis, karena kedekatan dan kesetiaan pada rezim. Dalam proses tersebut terbentuk berbagai pasukan ilmuwan sosial yang terdidik dengan baik, tidak ada celah selain mengikuti plot yang telah ditetapkan oleh negara-pemerintah (Dhakidae dan Hadiz: 2006: 8).

Pemerintah merangkul kaum cerdas di dunia kampus dan menjadikannya sebagai senjata utama penyebaran misi utamanya yaitu pembangunan. Pemerintah menyuntikkan dana yang tak sedikit dan jumlahnya berlipat bila dibandingkan dengan periode sebelumnya ke lembaga tersebut. Orde Baru mengembangkan suatu teknokrasi dan birokrasi pendidikan yang pada dasarnya dibuat untuk mendukung politik pembangunan. Dalam konteks saat itu, kondisi tersebut bersifat dualistis. Pertama: Orde Baru membutuhkan tenaga ahli (buruh ahli) terpelajar dan rasional dari perguruan tinggi yang menguasai bidang-bidang tertentu. Kedua: Orde Baru tidak menginginkan keterpelajaran dan rasionalitas dari calon-calon buruh tersebut kemudian menjadi sumbu dari radikalisme, aktivisme. Kedua hal yang ambivalen tersebut coba diwujudkan oleh Orde Baru dengan praktik-praktik doktrinasi, hal yang membuat ide-ide "Wajib Belajar", "Link and Match" kemudian beriringan dan memang harus bergandengan dengan pelajaran PSPB, Penataran P4, dan NKK/BKK. Penerapan rasionalitas yang tidaklah utuh. Pejabat struktural perguruan tinggi diikutkan dalam kursus Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), dan sebagian dosen juga menjadi pengajarnya. Sebagaimana proses *screening*, substansi P4, yang secara logika dan

filosofis kacau-balau, tidaklah penting, tetapi yang penting kiranya adalah proses intimidasi (Oetomo, 2007: 179).

Tidak hanya pejabat dan pegawai yang diwajibkan mengikuti program penataran P4, P4 juga masuk ke dalam kurikulum Ilmu Sosial secara vulgar. Buku “Komunikasi Sosial di Indonesia” (1980) yang ditulis oleh Astrid S. Susanto, yang salah satu bagiannya merupakan tulisan yang menjadi ceramah setahun sebelumnya, 1979 di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) misalnya menjelaskan bahwa Komunikasi Sosial harus dilandaskan pada Garis Besar Haluan Negara (GBHN) – 1978, “tentang Pola Umum Pelita Ke-tiga, khususnya tentang Arah dan Kebijaksanaan Pembangunan dalam bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum, Penerangan dan Pers, Hubungan Luar Negeri”. Astrid menuturkan dengan gamblang bahwa, “komunikasi sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa, dalam hal ini berdasarkan Pancasila. Kegiatan-kegiatan Penataran 4 dapatlah diartikan dalam hal ini, yaitu meningkatkan komunikasi sosial antar para penyelenggara negara dari berbagai eselon dan berbagai instansi” (Susanto, 1980: 16). Astrid menyitir ucapan Soeharto, bahwa terdapat dua jenis kontrol sosial yaitu disiplin sosial dan disiplin nasional, “Dalam hubungan ini fungsi kontrol sosial dari pers nasional kita sangat besar peranan dan pengaruhnya untuk menyoroiti gejala-gejala kemerosotan kesadaran hidup berdisiplin demi terpeliharanya ketertiban dan dilaksanakannya hukum secara konsekuen...” (Susanto, 1980: 17).

Pada posisinya dapat dilihat visi Astrid ketika membicarakan lingkup *Komunikasi Sosial* salah satunya adalah relasi pers dengan negara dan pemerintah. Bagaimana pers harus membicarakan masalah atau isu-isu sosial yang tidak terjangkau oleh pemerintah. Namun, walaupun ia mencoba mendeskripsikan bahwa pemerintah selalu terbuka menerima kritik dari pers, selama pers melandaskan diri pada ‘kebenaran’, semua tulisan Astrid menjadi sangat normatif mengingat pada periode yang tak jauh dari itu, tak sedikit pers yang dibreidel oleh pemerintah (Haryanto, 2006).

Ignas Kleden menuturkan, ilmu sosial selama Orde Baru berperan sebagai alat rekayasa sosial (Kleden 1986: 6-7). Apa yang menjadi kecenderungan utama yang berlangsung selama masa Orde Baru adalah pengembangan ilmu sosial sebagai bagian integral dari agenda pembangunan Orde Baru mulai dari dekade 1970-an hingga 1990-an. Dengan dukungan negara, para ilmuwan sosial yang terdidik di luar – maupun di dalam – menyelenggarakan berbagai seminar, lokakarya dan berbagai bentuk kerjasama yang mencoba membangun tali relevansi antara ilmu sosial dengan doktrin pembangunan.

Pada bidang “penerangan” misalnya, kerjasama antara LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan penerangan Ekonomi dan Sosial) dengan EWCI (*West Communication Institute*), atas sponsor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 1977 membuahkan buku “Asas-asas Komunikasi antar Manusia.” Buku tersebut merupakan terjemahan dan gubahan dari buku *Fundamental Human Communication*, karangan D. Lawrence Kincaid dan Wilbur Schramm

(1975). Buku yang banyak membahas tentang kontrol kelahiran: contoh praktik di beberapa negara tetangga seperti Filipina, landasan konseptual dan bagaimana kampanye terkait program kontrol kelahiran dapat efektif dilakukan ini menjadi rujukan dalam pokok bahasan Program Kependudukan/Keluarga Berencana yang diselenggarakan oleh BKKBN, dan menjadi pegangan bagi pelaksana Program Nasional Keluarga Berencana. Upaya kontrol penduduk merupakan salah satu program andalan Orde Baru, untuk menyiapkan komabilitas masyarakat terhadap berbagai program pembangunan lain yang diselenggarakan oleh pemerintah (Kincaid & Schramm, 1975).

Morfit (1981) dalam artikel yang dimuat di dalam Prisma menjelaskan, bahwa pada dekade 80-an, "hampir setiap departemen (kementerian) pemerintah mendirikan suatu seksi penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan apa yang dimaksudkan sebagai penelitian yang berorientasi pada garis kebijaksanaan." Tak terkecuali Departemen Penerangan, yang memiliki fungsi untuk menjaga agar pers dan sarana informasi lainnya tak memiliki potensi untuk menjadi radikal, serta memberikan penyuluhan perihal doktrin 'pembangunan' yang menjadi doktrin Orde Baru. Departemen Penerangan menjadi sponsor utama penelitian-penelitian di kampus, yang memiliki jurusan Ilmu Penerangan/Ilmu Publisistik/Ilmu Komunikasi. Hal tersebut dapat dilihat dari daftar penelitian yang dilakukan oleh Departemen Komunikasi Massa Universitas Indonesia (1970-1980). Judul-judul penelitian tersebut meliputi:

1. Kebijakan penerangan/Komunikasi PELITA II. (Penelitian Komunikasi Pedesaan di Indonesia) Penelitian ini merupakan hasil kerjasama antar Universitas (UI, Unhas, GAMA dan Unpad) dengan Bapenas, 1973.
2. Persepsi Pemerintah dan Masyarakat tentang Sesuatu Proyek Pembangunan. Penelitian ini dibiayai melalui DIP-UI, 1974.
3. Audience TVRI di Jakarta-Yogya-Medan. Penelitian ini merupakan hasil kerjasama antara FIS-UI dengan Departemen Penerangan RI, 1975.
4. Pengembangan Pola-Pola Pemasaran Baru Film Nasional. Penelitian ini merupakan hasil kerjasama antara FIS-UI dengan Departemen Penerangan RI, 1976.
5. Pola Siaran TVRI. (Suatu Studi Sosial Budaya dan Bahasa di Jakarta, Tangerang, Cirebon, Yogyakarta dan Surabaya). Penelitian ini merupakan hasil kerjasama antara FIS-UI dengan Departemen Penerangan RI, 1976.
6. Pengaruh Bahan Bacaan Anak SD Sebagai Media Komunikasi Massa. (Pengukuran daya vibrasi dengan G.Transform pada momen efektif komunikasi pada tahap pertama). Penelitian ini dilaksanakan oleh mahasiswa Departemen Komunikasi Massa FIS-UI, 1976.
7. Peranan Media Massa di Daerah Perbatasan. Penelitian ini merupakan hasil kerjasama antara FIS-UI dengan Departemen Penerangan RI, 1977.
8. Pengaruh Film di Pedesaan. Penelitian ini merupakan hasil kerjasama antara FIS-UI dengan Departemen Penerangan RI, 1977.

9. Efektivitas RRI dan Radio Pemerintah Daerah Sebagai Transformer Informasi Pembangunan. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa tingkat III Departemen Ilmu Komunikasi Massa, 1979.
 10. Penerangan Media Film dan TV dalam Pembangunan Desa. (Suatu studi pilot di Desa Kepala-Dua, Kabupaten Tanggerang). Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa tingkat III, Departemen Ilmu Komunikasi Massa 1979.
 11. Strategi Komunikasi Film untuk Pembangunan Desa (Suatu pendekatan analisa jaringan komunikasi di Desa Ciengang, Kabupaten Sukabumi). Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa tingkat III Departemen Ilmu Komunikasi Massa.
 12. Sistem penerangan terpadu pada tingkat Kabupaten/Kotamadya untuk menunjang berfungsinya Puspenmas Secara efektif. Penelitian ini merupakan hasil kerjasama antara FIS-UI dengan Departemen Penerangan RI, 1978.
1. Publisistik/Ilmu Komunikasi dengan Direktorat Jenderal Pariwisata tahun 1972.
 2. Strategi Komunikasi Pembangunan Untuk Pelita II. Penelitian ini merupakan hasil kerjasama antara Fakultas Publisistik/Ilmu Komunikasi dengan Departemen Penerangan, P&K serta Bappenas, 1973.
 3. Efektivitas Komunikasi *PATA Conference* 1974. Penelitian ini merupakan hasil kerjasama antara Fakultas Publisistik/Ilmu Komunikasi dengan Ditjen Pariwisata 1974.
 4. Sikap Masyarakat terhadap Masalah-Masalah Nasional. Penelitian ini merupakan hasil kerjasama antara Fakultas Publisistik dengan Departemen Penerangan, 1974.
 5. Komunikasi Departemen Penerangan Internal-Eksternal (Inklusif Bakohumas). Penelitian ini merupakan hasil kerjasama antara Fakultas Publisistik/Ilmu Komunikasi dengan Departemen Penerangan, 1981.
 6. Pendapat Khalayak Terhadap Radio, Televisi, Film. Penelitian ini merupakan hasil kerjasama antara Fakultas Publisistik/Ilmu Komunikasi dengan Departemen Penerangan, 1981.

Tak hanya di jurusan Komunikasi Massa di Universitas Indonesia, Departemen Penerangan juga menitipkan pesanan penelitian yang berkaitan dengan program pembangunan di satu-satunya fakultas Ilmu Komunikasi yang tercatat di bawah Perguruan Tinggi Negeri yaitu, Fakultas Publisistik/Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Berikut ini beberapa penelitian yang diselenggarakan oleh Fikom Unpad pada medio 1970-1980:

1. Industri Pariwisata di Jawa Barat. Penelitian ini merupakan hasil kerjasama antara Fakultas

Sementara itu di Universitas Diponegoro:

1. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa Tambaklorok Kotamadya Semarang dan Desa Gumalang Kabupaten Jepara.
2. Penelitian ini merupakan hasil kerjasama Jurusan Komunikasi FISIP UNDIP dengan Lembaga Ekonomi dan Kebudayaan Nasional (LEKNAS – LIPI), 1984 – 1985.

3. Profil Wanita Pekerja di Sektor Informal di Kotamadya Semarang. Penelitian ini merupakan hasil kerjasama Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP dengan LEKNAS-LIPI, 1985.
4. Pola Komunikasi dalam Birokrasi pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan hasil kerjasama Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP dengan Pemerintah Daerah atas biaya P&K.
5. Dampak Koran Masuk Desa pada Masyarakat Pesisir Kabupaten Semarang. Penelitian ini merupakan hasil kerjasama Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP dengan pemerintah Daerah atas Biaya P&K.
6. Demonstration Effect program Siaran TVRI pada Anak-anak. Penelitian ini merupakan hasil kerjasama Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP dengan Pemerintah Daerah atas biaya P&K.
7. Strategi Komunikasi Pedesaan di Desa Mijet Kotamadya Semarang.
8. Komunikasi Persuasif dalam Proses Komunikasi Sosial pada Masyarakat Desa Gondoriyo Kotamadya Semarang.
9. Analisis isi berita Kependudukan dan Lingkungan Hidup pada Surat Kabar di Indonesia tahun 1980.
10. Peningkatan Kemampuan dan Pengembangan Lembaga-Lembaga yang bergerak di Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial di Lima Propinsi (Jateng, Jatim, DKI Jakarta, Bengkulu, Kalimantan Tengah).
2. Pendapat Umum tentang PELITA di Sulawesi Selatan (1972).
3. Kebijaksanaan Penerangan PELITA II (1973).
4. Penetapan Pers Nasional yang Bebas dan Bertanggungjawab di Kotamadya Ujung Pandang (1974).
5. Sikap Masyarakat Sulawesi Selatan terhadap Keluarga Berencana (1975).
6. Pengaruh Siaran TVRI Ujung Pandang terhadap Kegiatan Belajar Anak-anak Tingkat Sekolah Dasar (1975).
7. Arus Informasi dan Pendapat Umum tentang Hasil-hasil Industri dalam Negeri (1977).
8. Peranan Opinion Leaders dalam Komunikasi Pembangunan Masyarakat Desa di Sulawesi Selatan (1978).
9. Sikap Masyarakat terhadap Masalah Nasional (1978).
10. Efektivitas Radio sebagai Media Penerangan, Pendidikan dan Hiburan (1979).
11. Aspek Sosial Psikologis yang Memengaruhi Penerimaan Inovasi dalam Proses Komunikasi (1980).
12. Apresiasi Masyarakat terhadap Kegiatan Penerangan melalui Berbagai Saluran (1980).
13. Penyebaran dan Pengaruh Surat kabar di Daerah Pedesaan (1981) Tahap I.
14. Penyebaran dan Pengaruh Surat kabar di Daerah Pedesaan (1981) Tahap II.
15. Pengembangan Hasil Penelitian Pengaruh dan Penyebaran Surat kabar di Pedesaan (1982/1983).

Sedangkan di Universitas Hasanuddin

1. Perkembangan pers di Ujung Pandang (1965).

Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Massa Surabaya (STIKOSA)

1. Penelitian di Bidang Penerangan (membantu Deppen). 1973-1974.
2. Penelitian tentang komposisi isi surat kabar Daerah Jawa Timur, 1974.
3. Penelitian di bidang film, TV dan siaran Pedesaan (kerjasama dengan Deppen) 1975.
4. Penelitian tentang Pers Daerah oleh Deppen RI (kerjasama) 1975.
5. Mengadakan studi perbandingan tentang isi, muka dan lain-lain Surat kabar, 1976-1977.
6. Membantu penelitian Deppen dan UGM di bidang Pers, 1980.
7. Membantu penelitian Deppen di bidang penerangan (Puspenmas - Pusat Penerangan Masyarakat), 1981.

Penelitian-penelitian pada kurun 1970-1980-an diselenggarakan hanya sebagai syarat untuk menunjukkan legitimasi keilmuan, tanpa tujuan yang mendasar. Metodologi penelitian komunikasi mengalami stagnasi, di mana umumnya penelitian-penelitian hanya menggunakan metode survey sederhana, tanpa memerhatikan secara spesifik masalah yang diteliti. Alat ukur, skala, desain dan bahkan kuesioner, yang serupa digunakan untuk meneliti masalah yang berbeda-beda, tanpa perubahan dan pendalaman yang layak. Dahlan (ISKI, 1987: 162) bahkan menyebutkan bahwa, banyak hasil penelitian pada saat itu mungkin tidak mencerminkan gejala yang diteliti. Pengembangan teori, apalagi paradigm, sangat minim. Secara garis besar, terlihat keengganan para peneliti dan/atau sarjana Ilmu Komunikasi untuk mendalami teori. Teori-teori seringkali digunakan secara serampangan, dan bahkan kurang relevan dengan penelitian. Pengetahuan tentang suatu teori

sering dicuplik dari ringkasan buku teks atau tulisan rangkuman, tanpa memahami konsep dan keterbatasan konsep, serta konteks di mana dan bagaimana teori-teori tersebut diformulasikan (Dahlan dalam ISKI, 1987).

Pada periode yang hampir bersamaan, terjadi upaya penyeragaman untuk menciptakan kategori yang ketat atas "Ilmu Komunikasi". Gagasan tersebut pertama kali didiskusikan dan dibicarakan dalam lingkup Fakultas Publisistik Universitas Padjadajaran pada tahun 1968, tetapi lembaga pendidikan tinggi yang pertama menggunakan istilah komunikasi adalah Universitas Indonesia, yaitu Departemen Komunikasi Massa yang bernaung di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penggunaan istilah Ilmu Komunikasi secara seragam dan menyeluruh baru dilakukan secara resmi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1981 mengenai penataan fakultas pada Universitas/Institut Negeri.

Bergesernya orientasi dari mazhab Kontinental ke mazhab Anglosaxon adalah hal yang menyebabkan munculnya gagasan untuk menggunakan istilah Ilmu Komunikasi sebagai pengganti Ilmu Publisistik. Pada tahun 1974, Dekan Fakultas Publisistik Universitas Padjadajaran, Dr. Astrid S. Susanto, dalam suatu lokakarya di Bandung yang dihadiri oleh seluruh Ketua Jurusan Publisistik seluruh Indonesia bertanya kepada seluruh peserta, apakah akan diskusi dalam lokakarya tersebut akan tetap memakai istilah publisistik atau menggantinya menjadi komunikasi. Astrid pada saat itu menyitir perkataan Helmut Schelsk, bahwa komunikasi memiliki cakupan lebih luas ketimbang publisistik, karena publisistik hanya satu bentuk khusus dari

komunikasi. Lokakarya tersebut dapat dianggap sebagai salah satu totem, penanda terjadinya *epistemic turn* di mana “Ilmu Komunikasi” mulai dibicarakan dalam ranah keilmuan di Indonesia, dan “publisistik” yang sebelumnya merupakan disiplin ilmu tersendiri kemudian dianggap sebagai bagian dalam Ilmu Komunikasi (Antoni, 2012: 13-34).

D. Kapital dan Hubungan Masyarakat dalam Diskursus Ilmu Komunikasi

Sejak tahun 1986 pada masa Orde Baru, para teknokrat Indonesia berhasil memperkenalkan sederetan reformasi kebijakan yang signifikan dengan maksud memacu kembali sektor manufaktur yang diharapkan tumbuh, namun mengalami perlambatan yang signifikan, serangkaian monopoli impor dicabut. Pelonggaran syarat-syarat tersebut disebabkan meredupnya *boom* minyak yang sebelumnya terjadi pada dekade 1970-an. Negara membutuhkan alternatif kebijakan baru untuk menjamin masuknya kapital asing sebagai modal dari rezim yang mencanangkan ‘pembangunan’ sebagai doktrin utamanya. Anjloknya harga minyak secara dramatis menggeser pilihan-pilihan bagi pelaku ekonomi utama. Terjadi pergeseran dalam peta kapital Indonesia, mobilisasi sumber-sumber dana investasi baru dari sektor perminyakan menuju sektor swasta. Keran impor dibuka sangat lebar dengan diberlakukannya pengurangan tarif masuk. Pinjaman-pinjaman bank berjangka pendek telah menggantikan uang minyak sebagai mesin utama pertumbuhan dunia usaha pada dekade 1980-an (Hadiz, 2005: 121; Robison, 2013: 302-303).

Terbuka lebar keran modal asing ke Indonesia pada saat itu menjadi alasan mengapa mulai bermunculan perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. Negara mengambil langkah-langkah untuk membantu kaum kapitalis swasta untuk mengerjakan tanggung jawab berbagai proyek-proyek vital. Perubahan dan aras kebijakan ekonomi tersebut tercermin secara signifikan pada era akhir-akhir Orde Baru. Terjadi peningkatan yang signifikan izin investasi asing dari US\$ 9 miliar menjadi US\$ 39,9 miliar di dekade akhir Orde Baru, di antara tahun 1990-1995. Uang dari Asia Timur Lanjut secara signifikan membanjiri struktur kapital di Indonesia. Menjelang tahun 1995, bank-bank swasta domestik telah berjumlah sekitar 240 buah, memegang 53 persen dari *outstanding* bank dan 47,7 persen kredit bank *outstanding* dibandingkan 37 persen dan 41,9 persen untuk bank-bank pemerintah. Sedangkan peran negara sendiri dalam plot ekonomi, perlahan tapi pasti terus menciut dari 69 persen pada tahun 1979-1980 menjadi hanya 27 persen saja pada tahun 1993-1994 (Hadiz, 2005: 122).

Meningkatnya kapital asing di Indonesia memberikan dampak yang signifikan pada industri media massa pada saat itu. Imperium-imperium media mulai tumbuh dengan subur, dan ranum hingga mencapai puncaknya pada akhir dekade 80an dan pada dekade 90-an. Kelompok *Kompas-Gramedia* menjadi yang terdepan dan mendominasi industri percetakan pada kala-kala itu. Kelompok ini kemudian menjadi satu dari empat puluh konglomerat kelas kakap di Indonesia (Hill, 2011: 99). Bermunculan juga grup-grup yang bergerak di bidang media massa, seperti kelompok *Sinar Kasih*

yang memayungi surat kabar *Sinar Harapan*, berturut-turut juga *Jawa Pos group* yang dipimpin oleh Dahlan Iskan, Kelompok Media Indonesia, Kelompok Tempo Grafiti. Pada saat itu televisi juga mulai naik ke atas meja industri media, *RCTI (Rajawali Citra Televisi Indonesia)* diluncurkan pada 24 Agustus 1989, menjadi televisi komersial pertama yang beroperasi di Indonesia. Setelah bersiarnya *RCTI*, berturut-turut mengudara stasiun-stasiun televisi lain seperti *SCTV (Surya Citra Televisi Indonesia)*, *TPI (Televisi Pendidikan Indonesia)*, *ANTEVE (Andalas Televisi)* dan *Indosiar (Indosiar Visuam Mandiri)*.

Peningkatan kapital asing di Indonesia pada saat itu, berjalan selaras dengan perkembangan industri media yang terus terpacu untuk tumbuh karena meningkatnya modal. Hal yang menciptakan relasi yang saling menguntungkan di antara keduanya. Situasi ini ikut mendorong peningkatan kebutuhan terhadap jasa konsultasi, baik dalam bidang hukum, periklanan, hubungan masyarakat di awal tahun 1970-an (Dahlan, 1994). Salah satu yang menjadi efeknya adalah peningkatan kebutuhan tenaga kerja yang bergiat di bidang *public relations*, tenaga ahli yang menengahi hubungan antara industri dengan masyarakat. Kebutuhan akan tenaga ahli memaksa kampus untuk memberikan respon. Beberapa kampus mengikutsertakan bidang keahlian *public relations* sebagai bagian dari Ilmu Komunikasi, melalui mekanisme penjurusan. Universitas Padjadjaran misalnya, berdasarkan Surat Keputusan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 133/0/1983 tanggal 5 Maret 1983 tentang organisasi dan tata kerja Unpad memutuskan, bahwa Ilmu Komunikasi memayungi 3

jurusan, selain Jurnalistik dan Penerangan yang merupakan produk warisan dari diskursus Publisistik, Hubungan Masyarakat juga ambil bagian di dalamnya sebagai salah satu jurusan yang diputuskan masuk ke dalam taksonomi Ilmu Komunikasi.

Diskursus Hubungan Masyarakat, sebenarnya tidaklah muncul pada saat itu secara tiba-tiba, walaupun pertumbuhan organisasi bisnis pada era 70-80-an mendorong peningkatan reproduksi diskursus Hubungan Masyarakat sebagai bagian dari diskursus keilmuan, Ilmu Komunikasi. Diskursus Hubungan Masyarakat telah muncul sebelumnya. Sejarah permulaan menubuhnya Hubungan Masyarakat dalam modul keorganisasian perusahaan atau institusi yang ada Indonesia secara pada tahun 1950-an. Kala itu berdiri organisasi HUPMAS pertama kali di perusahaan perminyakan negara (Pertamina). Peranan divisi HUPMAS (Hubungan Pemerintah dan Masyarakat) Pertamina ini memiliki tugas untuk menjalin hubungan komunikasi timbal balik dengan pihak klien, relasi bisnis, perusahaan swasta/BUMN/Asing dan masyarakat. Kemudian pada tahun 1954, secara resmi divisi yang mengatur persoalan Hubungan Masyarakat diterapkan juga dalam jajaran kepolisian. Berangsur, pelembagaan Hubungan Masyarakat dalam institusi pemerintah menjadi standar, diskursusnya menjadi epistemik, di mana hampir semua institusi pemerintah membakukan bagian tersebut. Secara resmi pembentukan HUMAS di Indonesia lahir melalui Presidium Kabinet PM Juanda, yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus membentuk bagian/divisi HUMAS. Menurut Dahlan (1978), hingga akhir tahun

1960-an, hampir semua departemen pemerintah memiliki divisi yang mengurus sektor Hubungan Masyarakat, yang berada di berbagai tingkatan. tetapi dengan penempatan yang sangat bervariasi. Banyak diantaranya berada di bawah bagian pemasaran, sementara yang lainnya berada bersama dengan bagian hukum (Dahlan, 1978; Putra, 1996; Putra, 2008).

Diskursus Hubungan Masyarakat, serta teknik pelembagaannya tidak dapat dilepaskan dari terpacunya Indonesia untuk menjadi negara industrial. Sebagai bagian dari NIES (*Newly Industrializing Economics*) bersama Thailand, Malaysia dan Philipina, Indonesia, Indonesia berusaha mengatasi krisis pasca surutnya *boom* minyak dengan membuka keran-keran impor selebar-lebarnya. Terbukanya kanal tersebut memberikan implikasi pada meledaknya industri media, serta kebutuhan akan profesionalisme dalam dunia perputaran informasi-komunikasi. Hill (2011) mengungkapkan pada tahun 1970-an terjadi peningkatan jumlah iklan (bilangan, maupun kapital) di Indonesia. Hal yang kemudian membuat *pubic relations*, yang sebelumnya pada tahun 1950-60-an telah memulai masa kanak-kanaknya terus tumbuh, hingga pada tahun 1970 dan 1980-an mengalami pendewasaan, karena tuntutan untuk melayani industri yang juga sedang ranum pada saat itu. Hubungan Masyarakat, pelembagaannya serta masuknya ke lapangan diskursus keilmuan (dengan tujuan untuk meningkatkan sarjana-sarjana terampil dalam *Hubungan Masyarakat*) selalu melekat dengan aras laju kapital.

E. Anti-Komunisme dan Absennya Marxisme dalam kajian Ilmu Komunikasi

Pasca Gerakan Satu Oktober 1965 (Gestok 1965) terjadi pembantaian jutaan orang secara sistematis oleh Orde yang berkuasa. “Komunis” dijadikan musuh bersama, dianggap bersebrangan dengan Pancasila, lawan dari pembangunan. Herlembang (2013) dalam disertasinya yang kemudian dibukukan, mencatat berbagai cara Orde Baru menancapkan legitimasi anti-komunisme-nya dalam berbagai produk-produk budaya. Terdapat kepercayaan karena efek yang bekerja dari *theatre of mind* di masyarakat, bahwa ‘seandainya orang-orang komunis tidak dibunuh, maka mereka yang membunuh itu pasti akan menjadi korban komunis.’ Tak sedikit yang menyakini dan mengkhawatirkan bahwa pasca Gestok, pihak komunis akan membalas dendam (Siegel, 2000: 7).

Terjadi depolitisasi dalam ruang-ruang publik, hanya Pancasila yang boleh disebutkan, dan tidak yang lain. Hal tersebut berefek pada ketakutan masyarakat luas, dan sangat berpengaruh pada diskursus kebahasaan. Saya Sasaki Siraishi (2009: 237) mencatat terjadi perubahan dalam diskursus tuturan di ruang kota besar, Indonesia, seperti kata “pemuda” yang melekat dengan corak revolusioner, diganti dengan kata “remaja”. “Revolusi” yang biasanya digaungkan oleh Soekarno pada periode sebelumnya, digantikan oleh kata-kata “pembangunan” oleh Soeharto. Perubahan tuturan yang berkait dengan doktrin anti-komunisme, terminologi yang biasanya melekat pada masa-masa Orde Lama, seperti “bung” lenyap dan terganti dengan sapaan-sapaan yang memiliki corak lebih halus. Operasi kekuasaan melalui praktik komunikasi sebagai bagian dari agenda de-edukasi

juga dilakukan dengan melakukan penggantian terhadap istilah-istilah sosial lainnya.

Selain melalui karya-karya seni, pengendapan doktrin anti komunisme dilakukan dengan proses penyeleksian ilmu pengetahuan di universitas. Orde Baru menginginkan ilmu pengetahuan netral dari politik. Dalam dunia akademis, agenda de-edukasi ini secara otomatis mengakibatkan tersingkirnya para intelektual kritis dari arena akademis. Debat akademis pun menghilang karena represi yang dilancarkan Orde Baru dalam kehidupan akademis. Farid (2004) mengungkapkan bahwa banyak sarjana, pengajar, peneliti, dan mahasiswa ilmu sosial yang dibunuh, ditahan, dan diasingkan atau dihilangpaksakan sejak Oktober 1965. Universitas, dalam hal ini birokrasi bersikap sangat tunduk terhadap Orde Baru pada saat itu. Hal tersebut membuat, selama Orde Baru berkuasa, ilmu-ilmu sosial di Indonesia sangatlah polos dan tidak memiliki corak perspektif kritis. Buku-buku kiri dan literatur-literatur yang condong ke arah kiri, dengan kata lain bernafaskan Marxisme bersama variannya (marxisme klasik, neo-marxisme, frankfurt school dst) disensor dan cenderung dijauhi untuk digunakan dalam berbagai analisis di dunia pendidikan universitas (Farid, 2004).

Indonesia sendiri pada era 1970-80a memasuki periode politik yang mengedepankan pragmatisme dan pembangunan ekonomi. Paradigma Ilmu Sosial yang berkembang saat itu lebih didominasi oleh teori modernisasi yang dikembangkan para ahli positivistik dengan tokoh-tokoh yang menonjol, di antaranya WW. Rostow (ekonom), Samuel Huntington, Myron Weiner,

Lucien Pye, Gabriel Almond dan Sidney Verba (Politik), Clyde Kluckhohn (Antropologi), Neil J. Smelser (Sosiologi), dan David McClelland (Psikologi). Dalam periode itu, saat Indonesia cenderung mementingkan pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Dalam konteks seperti itu, muncul beberapa intelektual yang menjadi penyokong kebijakan Orde Baru, seperti Widjojo Nitisastro, Mohammad Sadli, Emil Salim, Ali Wardhana. Para sarjana di luar bidang ekonomi, beberapa nama kita kenal, di antaranya Kentjaraningrat (Antropologi), Harsya Bachtir dan Selo Sumardjan (Sosiologi), Fuad Hasan (Psikologi), Alwi Dahlan dan Astrid S. Susanto (Ilmu Penerangan/Publisistik/Komunikasi), dan banyak lagi ilmuan yang ada di barisan itu (Tirtosudarmo, 2007). Astrid S.Susanto sendiri adalah seorang sarjana Ilmu Komunikasi, yang mengenyam pendidikan di Jerman. Bila menilik dari buku-bukunya yang ia tulis, seperti buku *Komunikasi Kontemporer* yang mempromosikan Komunikasi Pembangunan serta turut sertanya Astrid dalam proyek Departemen Penerangan, tidak dapat dilihat jejak filsafat kritis di sana. Astrid, *par excellence* adalah ilmuan yang turut serta mempromosikan, serta menjadi bagian dari elit cendekia yang otoritatif merumuskan proyek pembangunan-isme Orde Baru.

Salah satu konsekuensi atas pemisahan antara pengetahuan dengan politik, serta keberpihakan yang terlalu signifikan pada teori-teori modernisasi, karena kecenderungan Ilmu Sosial untuk menjadi makelar mimpi, negara pembangunan, atau dalam istilah Mac Dougal (1986), sebagai *technoratic state*, dalam istilah Feith

(1979), *repressive-developmental regime* atau dalam tuturan Both dan McCawley (1981), *malign inventionist*. Hal yang membuat terjadinya pengabaian terhadap analisis kelas-struktural dalam kajian-kajian ilmu sosial Indonesia. Analisis kelas dianggap cenderung ke-kiri-kiri-an, mengingat basisnya adalah kritik atas kontradiksi kelas, satu dan yang lainnya, serta analisis kelas tidaklah dianggap produktif dalam kajian ilmu sosial, yang pada saat itu memiliki orientasi utama sebagai pelayan dari doktrin rezim pembangunanisme (Farid, 2004). Ilmu Sosial sendiri hanya didudukkan sebagai penyokong teknis kebijakan Orde Baru. Selain itu, kualitas penelitian yang dihasilkan pada masa Orde Baru pun dapat dikatakan rendah karena hanya berorientasi pada proyek dan tidak memberikan sumbangan yang berarti dalam hal kritik terhadap teori. Hal ini disebabkan karena pada masa Orde Baru, banyaknya penelitian (tentunya yang sesuai dengan doktrin pembangunanisme Orde Baru) adalah lebih penting daripada isi penelitian itu sendiri. Debat akademis pun menghilang, karena represi yang dilancarkan Orde Baru dalam kehidupan akademis. Intelektual-intelektual yang kritis terhadap pemerintah, tersingkirkan, entah dengan sanksi birokratis maupun dengan praktik pengucilan oleh kolega-koleganya.

Momen pecahnya reformasi, pada tahun 1998 sebenarnya memberikan angin segar pada harapan pada dimasukkannya kajian Marxisme, maupun analisis-analisis kelas dalam ilmu sosial pada umumnya, maupun Ilmu Komunikasi khususnya. Namun, jauh panggang dari api, berbeda dengan ilmu lainnya, seperti Sosiologi dan

Antropologi, Ilmu Komunikasi cenderung resisten terhadap kajian-kajian berperspektif Marxist. Ilmu Komunikasi yang bila pada masa Orde Baru menjadi pelayan rezim, maka pasca reformasi, keberpihakan Ilmu Komunikasi cenderung memihak atau tunduk di depan pasar.

F. Ilmu Komunikasi Pasca-Orde Baru

Terjadi kemelut politik yang signifikan pada medio dekade 90-an di Indonesia. Orde Baru dirongrong oleh protes ekstra-parlementer yang bak bola salju, terus membesar dari awal tahun 90-an hingga 98. Buruh, mahasiswa dan simpatisan partai politik PDI dan PPP (oposisi biner rezim politik Orde Baru) yang jengah pada tindakan represif Orde Baru menjadi basis masa, aksi protes tersebut (Lane, 2014: 276). Pers semakin meradang, dengan dibreidelnya 3 media besar pada tahun 1994, Tempo, Detik dan Editor. Momen yang memunculkan kelahiran Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) melalui Deklarasi Sinargalih (Utami, dkk, 1994: iii). Hal tersebut diperparah dengan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, krisis tersebut menjadi bensin, yang menyuplai api krisis politik, dan ketidakpercayaan pada kewibawaan kepemimpinan orde baru (Heryanto, 2004: 13). Puncaknya, pada tahun 1998 terjadi demonstrasi besar yang berlanjut pada *chaos* dan memaksa Suharto turun dari kursi presiden. Tahun 1998 menjadi penanda awal berakhirnya Orde Baru, orde yang sangat represif, digantikan dengan orde reformasi. Pergantian orde memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai diskursus politik di Indonesia. Departemen Penerangan yang merupakan aparatus propagandis Orde Baru

sekaligus menara panoptik yang mengawasi berbagai alur komunikasi di tubuh masyarakat, dalam berbagai sendinya, mikro maupun makro, dibubarkan. Pembubaran Departemen Penerangan terjadi pada era Abdurrachman Wahid (Gusdur) menjadi Presiden RI pada tahun 1999.

Pembubaran Departemen Penerangan tersebut menjadi totem penanda terbukanya gerbang kebebasan informasi, selain itu dia mengakhiri “penerangan” dalam diskursus kekuasaan negara. Sebelum pembubaran Departemen Penerangan, diskursus “penerangan” sendiri telah terkikis terlebih dahulu, dengan lenyapnya “Ilmu Penerangan” di universitas-universitas, hal tersebut terjadi bersamaan dengan merenggangnya hubungan antara universitas dan pemerintah. Pada momen kemelut menjelang 1998, terjadi polarisasi antara universitas dengan pemerintah. Bila pada tahun 1980-an hubungan antara pemerintah (negara) dengan universitas sangat instrumental, di mana universitas beserta ilmu-ilmu yang terdapat di dalamnya menjadi alat pertahanan kekuasaan negara, hal tersebut berbalik pada dekade 1990-an. Universitas-universitas menjadi kendaraan politik perlawanan mahasiswa. Basis masa yang bernaung di kampus, membuat hubungan universitas dan negara tidak lagi harmonis. Hubungan yang renggang serta berbagai gonjang-ganjing politik, serta ketidakpercayaan pada negara membuat relasi instrumental antara negara dan universitas kandas. Hal tersebut memengaruhi berbagai hal dalam konteks pengaruh negara dalam tubuh universitas, sepaket dengan ilmu-ilmu yang dikaji dan diajarkan di dalamnya, tak terkecuali Ilmu Penerangan yang dianggap menjadi

bagian dari Ilmu Komunikasi pada saat itu. Pada tahun 1996, Seluruh jurusan Ilmu Penerangan mengganti namanya menjadi jurusan Manajemen Komunikasi (disingkat Jurusan Mankom). Penetapan nama Manajemen Komunikasi didasarkan pada hasil pertemuan antar Perguruan Tinggi di Bandung dan Jakarta yang memiliki Jurusan Ilmu Penerangan. Perubahan nama tersebut, dan menghilangnya istilah “Ilmu Penerangan” menjadi penanda, bergesernya orientasi Ilmu Komunikasi dari yang semula sangat lekat dengan diskursus pengaturan negara (*governmentality*) Departemen Penerangan, menjadi cenderung lebih liberal dan berorientasi pasar.

Perubahan orientasi Ilmu Komunikasi dari sebelumnya, sebagai instrumen mesin politik negara, mendapatkan angin segar dengan dimulainya orde reformasi pada tahun 1998. Sejak tahun 1998, media massa tumbuh dengan subur di Indonesia. Bila sebelumnya kontrol terhadap media massa benar-benar ada di tangan pemerintah, semenjak dicabutnya berbagai peraturan yang memengaruhi regulasi media massa secara represif, media massa beralih ke tangan pasar. Peralihan orientasi media massa dari tangan negara menuju mekanisme pasar membuat lapangan kerja, yang berkaitan dengan media massa menjadi sangat berlipat. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang sangat signifikan pada media 2000-an, di mana teknologi mempengaruhi kultur masyarakat mengonsumsi media. Medio 2000-an awal menjadi saksi bermunculannya berbagai jenis media, mulai dari media cetak, seperti surat kabar, majalah, tabloid, media elektronik yang menggunakan gelombang

sebagai basis persebarannya, stasiun-stasiun radio bermunculan dan banyak stasiun televisi daerah yang mencatatkan namanya, hingga media-media berbasis online yang perkembangannya berjalan selaras dengan kemajuan teknologi internet. Secara kuantitatif, jumlah media massa pasca reformasi jauh berlipat ketimbang pada masa Orde Baru, hal tersebut mempengaruhi jumlah total pendapatan iklan nasional. Pada tahun 2002 misalnya, tercatat 13,41 triliun sebagai jumlah total pendapatan iklan nasional, 60,3 %nya diraih media televisi (Sudibyo, 2004: 33). Besarnya kue iklan dan banyaknya jumlah media massa berlipat memberikan lapangan kerja pada berbagai lulusan Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi yang pada saat itu terdiri dari beberapa jurusan: Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, dan Manajemen Komunikasi dianggap sebagai ilmu yang dapat menciptakan tenaga terlatih pengisi kekosongan tenaga kerja yang berkaitan dengan media massa, langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut membuat universitas-universitas yang memiliki jurusan Ilmu Komunikasi benar-benar diarahkan pada konsentrasi-konsentrasi yang diarahkan untuk media massa.

Perkembangan industri media, media cetak maupun *online* misalnya, memacu kebutuhan akan tenaga pekerja seperti wartawan, editor, penyunting gambar, staf redaksi. Slot-slot yang akan dipenuhi oleh lulusan Ilmu Komunikasi, dari jurusan Jurnalistik. Untuk jurusan Manajemen Komunikasi, mereka akan menjadi pengisi slot-slot pekerjaan yang terdapat di industri media, maupun pihak-pihak yang terkait dengan industri media. Seperti Industri rumah produksi yang menyuplai berbagai program acara TV swasta, maupun perusahaan

periklanan yang menjadi sumber penghasilan terbesar media, baik cetak maupun elektronik. Biro iklan misalnya membutuhkan pekerja dengan kapasitas tertentu untuk beberapa pekerjaan seperti penulis naskah iklan (*script writer*), *account executive*, *creative staff*. Sedangkan jurusan Hubungan Masyarakat, akan mengisi slot-slot industri komunikasi yang memiliki basis aktivitas untuk mengembangkan reputasi organisasi, hal ini tentu saja berkait erat dengan industri periklanan dan media massa pada umumnya.

Orientasi Ilmu Komunikasi yang cenderung pada penyediaan tenaga-tenaga terlatih untuk mengisi lapangan kerja dalam industri media dan informasi pada umumnya, menjadi pisau yang bermata dua. Secara kuantitatif, Ilmu Komunikasi berkembang dan kebutuhan industri akan lulusan Ilmu Komunikasi tampak jelas dari peningkatan jumlah perguruan tinggi yang membuka program Ilmu Komunikasi. Namun, orientasi Ilmu Komunikasi yang menjadi penyedia tenaga-tenaga pekerja terlatih dalam industri media tersebut memberikan implikasi negatif terhadap Ilmu Komunikasi itu sendiri. Ilmu Komunikasi menjadi sangat identik dengan istilah: Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Periklanan, Penyiaran dan Manajemen Komunikasi, istilah yang sifatnya sangat aplikatif (terapan). Ilmu Komunikasi tidak didudukkan sebagai sebuah kajian teoretik yang epistemologinya dapat terus berkembang, tetapi sebagai sebuah kajian terapan yang berimplikasi pada keseragaman dalam konteks pengkajian Ilmu Komunikasi.

Teori-teori kiri (marxist) dieliminir dalam berbagai kajian Ilmu Komunikasi, termasuk analisis

kelas, analisis historis, anak-anak teori tersebut yang kemudian dianggap berada di luar domain dari Ilmu Komunikasi, seperti teori pasca-kolonial yang belum pernah dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum mata kuliah Komunikasi Antar-Budaya, di jenjang kesarjanaan maupun pasca-sarjana berbagai universitas. Padahal Indonesia, adalah entitas yang mengalami gejala-gejala pasca-kolonial, seperti keberadaan subjek ambivalen, hibriditas, bila menilik dari berbagai analisis, dari dalam maupun Indonesianis asing yang dapat ditemukan di *paper-paper* ilmiah *Cultural Studies* dan *Media Studies* yang menjadikan Indonesia sebagai fokus bahasan

Cultural Studies sendiri, diskursusnya mulai dikenal di Indonesia pada dekade tahun 90-an. Pengaruh dari mazhab *Birmingham School*, yang menggunakan teori-teori dari berbagai horizon ilmu, dengan nafas Frankfurt School dan Filsafat Prancis mendapatkan angin segar, dan berjalan dengan sinergi dengan kondisi politik pergerakan pada saat itu. *Cultural Studies* di *Birmingham School* yang induk semangnya adalah CCCS (*Centre for Contemporary Cultural Studies*), pada taun 1950-an dianggap sebagai pendobrak karena melakukan analisis politik pada berbagai gejala sosial yang menempatkan sebagian dari anggota masyarakat sebagai golongan yang tersubordinasi. Nama-nama seperti Raymond Williams, E.P. Thompson, Perry Anderson, Tom Nairn, dan Terry Eagleton adalah nama yang menjadi bagian pemrakarsa CCCS. Para pakar ini memelopori pembahasan atas karya-karya Marx Muda dan Hegel yang menganalisis politik, masyarakat, dan kebudayaan populer. Mereka menerbitkan jurnal pemikiran kiri baru,

New Left Review, sebagai ikhtiar untuk menganalisis berbagai permasalahan sosial. Dalam kajian Ilmu Komunikasi sendiri kita mengenal nama-nama, seperti Raymond Williams, yang bukunya digunakan sebagai salah satu buku wajib kajian televisi, dan Stuart Hall yang namanya kerap kali dikutip oleh banyak ahli Ilmu Komunikasi dalam teori-teorinya, seperti: representasi; identitas; *encoding-decoding*, dst. Mekarnya *Cultural Studies* di Indonesia ditandai dengan terbitnya *Jurnal Kalam* (pertamakali terbit tahun 1994). Kemunculan *Kalam* menjadi pembeda dari jurnal-jurnal yang muncul pada saat itu, seperti *Prisma*, jurnal-jurnal ilmu-ilmu sosial, ekonomi dan politik yang sangat berpengaruh di kalangan intelektual Indonesia pada dekade 70-an dan 80-an. Nama-nama seperti Adorno, Horkheimer, Benjamin, Habermas dari Frankfurt School, intelektual-intelektual seperti Foucault, Derrida, Deleuze, Lacan dst menjadi nama-nama yang ramai dibicarakan dalam diskursus pengkajian ilmu sosial pada saat itu sebagai efek dari mulai mekarnya *Cultural Studies*, selain tokoh-tokoh *Birmingham School* sendiri. Pasca terbitnya *Kalam*, bermunculan berbagai lembaga yang membidani dan memberikan fokus pada *Cultural Studies* tersebut, yaitu munculnya Lembaga Peneliti Kebudayaan Realino, yang terintegrasi dengan Universitas Sanatha Dharma. Pada tahun 1999, di Yogyakarta berdiri *Kunci Cultural Studies*, kemudian berdiri *Pusat Studi Kebudayaan (PSK)* UGM yang dikomandoi oleh Faruk H.T, Heru Nugroho dan Ariel Heryanto. Selain lembaga penelitian, juga berturut-turut muncul beberapa buku yang bertema *Cultural studies* dan diterbitkan oleh penerbit yang mengkhususkan diri pada *Cultural Studies* seperti Jalasutra, Kreasi Diskursus, Pustaka Pelajar, dan penerbit lainnya

yang mayoritas berdomisili di Yogyakarta. Namun dalam perkembangannya, berbeda dengan Sosiologi maupun Antropologi, Ilmu Komunikasi belum pernah benar-benar mengakomodir *Cultural Studies*, sebagai sebuah tema utama dalam bahasan.

Pada perkembangannya, pengkajian Ilmu Komunikasi di Indonesia memang mendapatkan pengaruh dari tren *Cultural Studies* dan pengkajian ekonomi-politik di Indonesia, namun pengaruh tersebut tidaklah menjadikan kajian-kajian itu bersinergi dengan kurikulum Ilmu Komunikasi di Indonesia pada umumnya. Salah satu buktinya adalah dengan dibukanya Program Studi Kajian Budaya dan Media (KBM) yang bernaung di bawah Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. KBM, walaupun dalam tulisan Budi HH (2013: 39) dikategorikan sebagai salah satu program pascasarjana Ilmu Komunikasi, namun dalam praktiknya, KBM lebih sering dianggap sebagai program studi yang mengakomodir, kajian-kajian yang tak bisa ditampung, atau dianggap liyan dari kajian-kajian Ilmu Komunikasi pada umumnya.

Pengaruh tren *Cultural Studies* juga memberikan pengaruh terhadap produk penelitian. Berbagai analisis, seperti Semiotika, Analisis Diskursus, Analisis Diskursus Kritis, Analisis Ekonomi Politik memang dikenal sebagai metode-metode yang digunakan untuk menyelesaikan skripsi di tingkat kesarjana. Namun di level pengkajiannya, ia tidak masuk ke dalam kurikulum. Sarjana-sarjana Ilmu Komunikasi, memang kerap kali mengutip buku Vincent Mosco yang berjudul *The Political of Communication* (2009). Namun, terasa naif dan hanya menjadi main-main belaka, ketika membicarakan buku Mosco yang

jas-jelas menjadikan karya-karya Karl Marx sebagai catatan kaki, tanpa usaha memahami Marx. Tidak hanya itu, pengaruh *Cultural Studies* yang memberikan jejak pada berbagai penelitian Ilmu Komunikasi di Indonesia di berbagai level kesarjana, tidak menampak dalam pembahasan terkait kurikulum Ilmu Komunikasi yang diprakarsai oleh Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM), *Communication Review* (2012). Teori-teori tersebut hanya menjadi sampingan, dari orientasi Ilmu Komunikasi yang utama, yaitu menghasilkan lulusan yang “dengar cepat” dapat diserap oleh pasar dan dengan begitu mengikuti kebutuhan pasar. Orientasi yang membuat Ilmu Komunikasi sebagai ilmu, dan sebagai kajian menjadi mandeg (Rahardjo, 2013: 13).

Dalam perkembangannya, kemandegan dalam kajian-kajian Ilmu Komunikasi bersilangan dengan perkembangan industri media-massa yang tidak sehat. Bila pada awalnya 1998, dianggap sebagai angin segar pembuka pintu represi terhadap media, ternyata seiring perkembangannya, harapan tersebut jauh panggang dari api. 1998 adalah pembuka terjadinya praktik oligopoli dalam industri media massa. Data dan analisis yang dipaparkan oleh Nugroho (2012) dan Lym (2012) menunjukkan adanya oligarki dalam industri media massa di Indonesia. Terdapat pemusatan dalam peta kapital dan kepemilikan media-media di Indonesia. Jebolan-jebolan Ilmu Komunikasi, mau tak mau harus melayani perkembangan industri media yang tidak sehat tersebut. Lemahnya kajian-kajian ekonomi-politik (yang menggunakan analisis kelas) media yang berbasis di universitas memperparah kondisi

tersebut. Pekerja-pekerja media tidak mendapatkan cukup bekal untuk memproblematisir kondisi yang mereka alami sendiri, karena minimnya pengetahuan mereka tentang analisis kelas. Jebolan Ilmu Komunikasi yang kemudian bekerja di media massa, hanya menjadi skrup-skrup pengisi laju kapitalisme industri media massa.

Walaupun, begitu, masih terdapat noktah resistensi dalam perkembangan pengkajian dan/atau Ilmu Komunikasi di Indonesia. Bahwa tidak semua hal benar-benar mandeg, terdapat perkembangan yang dapat ditelisik dalam beberapa hal. Seperti, dibukanya Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi FISIP UI yang memiliki konsentrasi atau peminatan “baru” yaitu manajemen komunikasi politik. Ilmu Komunikasi, FISIP UI memang cukup populer dalam peta percaturan kajian Komunikasi Politik di Indonesia. Juga masuknya mata kuliah, ekonomi-politik dalam peta kurikulum Ilmu Komunikasi, yang di-*pioneer*-kan oleh Universitas Gadjah Mada. Hal yang saya tengarai diskursusnya dimulai bersamaan dengan munculnya beberapa paparan tentang tulisan-tulisan tentang filsafat kritis dari Dedy N. Hidayat seorang sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Indonesia, pada penghujung dekade 90-an dan awal 2000-an, dan kritik dari Agus Sudibyo (2004), walaupun masih belum bisa mengejar ketertinggalannya, pengajaran, juga pengkajian ekonomi-politik setidaknya, telah diretas dengan masuknya kajian tersebut ke dalam kurikulum. Ekonomi-politik telah diperhitungkan dalam diskursus Ilmu Komunikasi di Indonesia. Beberapa kampus, seperti Universitas Padjadjaran misalnya, turut serta memasukkannya ke dalam kurikulum kesarjanannya.

G. Kesimpulan

Tumbangnya Orde Baru, pada dasarnya memberikan berbagai harapan terhadap ilmu-ilmu sosial yang ada di Indonesia. Namun, harapan tersebut cenderung tumpul di hadapan Ilmu Komunikasi. Mengutip tuturan Rahardjo (2012), komunikasi kerap kali hanya dianggap sebagai sebuah kajian teoretik yang penyelenggara keilmuannya memiliki orientasi menghasilkan lulusan yang cepat diserap oleh pasar. Ilmu Komunikasi condong memihak pada pasar dan menjadi pelayan industri media massa dan informasi yang popularitasnya meledak pasca tumbangnya Orde Baru, ketimbang berposisi sebagai ilmu sosial yang memiliki kajian epistemologi yang ketat. Ilmu Komunikasi menjadi penyedia calon-calon buruh terlatih dalam berbagai bidang informasi dan industri media massa, seperti tenaga Hubungan Masyarakat, *Marketing Communication*, Jurnalis, Praktisi Periklanan dsb.

Artikel ini adalah sebuah usaha untuk menemukan jalan bagi perkembangan Ilmu Komunikasi. Dengan ikhtiar untuk mengisi kosongnya horizon studi terkait metamorfosa Ilmu Komunikasi, maka artikel ini disusun merentang jauh untuk menunjukkan kontinuitas dan diskontinuitas wacana pada masa Orde Baru hingga Pasca Orde Baru. Beberapa temuan dalam studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ide-ide dari perkembangan pengkajian maupun ilmu komunikasi itu sendiri. Misalnya, paparan bahwa Hubungan Masyarakat sebagai sebuah diskursus melaju bersama dengan arus kapital, maka selayaknya dipikirkan untuk mengadopsi berbagai varian baru dari teori-teori

Hubungan Masyarakat yang cenderung bersifat emansipatoris, seperti berbagai konsep *Critical Public Relations*, yang sudah cukup lama diujicoba di Eropa (L'Etang & Pieczka, 1997; L'Etang, 2005; Daymon & Demetrious, 2016). Begitupun, dengan paparan bahwa Ilmu Komunikasi selalu identik dengan kajian yang sifatnya terapan, maka diperlukan langkah untuk memulai kajian epistemologis komunikasi dari berbagai perspektif dan varian teori dengan sistematis. Tak terkecuali varian teori yang sebelumnya dianggap janggal berada dalam kajian Ilmu Komunikasi, seperti Marxisme maupun kajian-kajian Pasca-Kolonial, atau bahkan meretas pendekatan Ilmu Komunikasi, yang memiliki corak alternatif, dengan mempertimbangkan konteks di mana ia dibesarkan. Seperti yang sebelumnya telah dimulai oleh Wimal Dissanayake (1983; 1986; 2003) saat menghadirkan perspektif Asiatic pada Ilmu Komunikasi, dan coba terus dipantik oleh akademisi lain, seperti Ayish (2003) dan Gunaratne (2009). Dissanayake dalam beberapa tulisannya menonjolkan bahwa praktik komunikasi di Asia memiliki ciri yang plural, sehingga diperlukan teori dan model khusus untuk menjelaskannya, dan tentunya tidak bisa semena-mena mencangkok dari teori atau model komunikasi yang berlaku di Amerika maupun Eropa. Pada posisi Dissanayake, tersebut, maka paparan Alatas (2006) menjadi relevan, dan dapat menjadi salah satu pegangan, bahwa diperlukan diskursus alternatif terkait ilmu sosial Asia.

Menyadari berbagai kekurangan data yang terdapat dalam paparan artikel ini, saya berharap masih akan ada studi lanjutan yang jauh lebih serius

memeriksa diskursus komunikasi, sebagai sebuah kajian dan ilmu, dan tentu saja relasinya dan sifatnya yang inheren dengan kekuasaan. Tujuannya, tentu saja untuk terus mendekati utopia emansipasi dalam diskursus keilmuan komunikasi itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Alatas, Syed Farid. 2006. *Alternative Discourses in Asian Social Sciences: Responses to Eurocentrism*. Sage: India.
- Antoni. 2004. *Riuhnya Persimpangan Itu: Profil dan Pemikiran Para Penggagas Kajian Ilmu Komunikasi*. Solo: Tiga Serangkai.
- Ayish, M. I. 2003. "Beyond Western-Oriented Communication Theories A Normative ArabIslamic Perspective." *Journal of the European Institute for Communication and Culture*, 10(2): 79-92.
- Badjari, Atwar. 2010. *50 tahun dedikasi bagi negeri: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran*. Bandung: Fikom Unpad.
- Booth, Ann dan peter McCawley, 1981. "Indonesia Economy since the Mid-Sixties" dalam buku Ann Both dan Peter McCawley, *The Indonesian Economy during the Soeharto Era*. Kuala Lumpur; Oxford University Press.
- Dahlan, M. A., 1978, "The State of Public Relations in Indonesia." *Warta Perhumas*, Mei: 7-8.
- Dahlan, M. A., 1994, *Profesi Humas Pemerintah Menghadapi Globalisasi*. Makalah disampaikan pada Konvensi Nasional Humas Surabaya, 24-26 September.
- Dale Scott, P, 1985. "The United States and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967", *Pacific Affair*, Vol. 58 (2).
- Daymon, C., & In Demetrious, K. 2016. *Gender and Public Relations: Critical Perspectives on Voice, Image and Identity*. London: Routledge.

- Dhakidae, Daniel. 2003. *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dhakidae, Daniel. Hadiz, Vedi R. (ed.). 2006. *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: Equinox Publishing Indonesia dan Ford Foundation.
- Dissanayake, W. 1986. "The Need for the Study of Asian Approaches to Communication". *Media Asia* Vol 13(1): 6-13.
- Dissanayake, W. 1988. "The Need for Asian Approaches to Communication." In W. Dissanayake (Ed.), *Communication Theory: The Asian Perspective*. Singapore: AMIC.
- Dissanayake, W. 2003. "Asian Approaches to Human Communication: Retrospect and Prospect." *Intercultural Communication Studies*, Vol 12(4): 17-38.
- Farid, Hilmar. 2004. "Masalah Kelas dalam Ilmu Sosial di Indonesia" dalam Vedy Hadiz dan Daniel Dhakidae (Eds), *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta-Singapore: Equinox Publishing.
- Feith, Herbert. 1979. *Repressive Developmentalist Regime in Asia: Old Strength New Vulnerabilities*. Artikel disampaikan dalam New York Conference of the World Order Model Project.
- Foucault, M. & , Sheridan, A. 1972. *The Archaeology of Knowledge*. New York: Pantheon Books.
- Gunaratne, S. A. 2009. "Asian Communication Theory" in S. W. Littlejohn & K. Foss (Ed), *Encyclopedia of Communication Theory*. California: Sage Publications.
- Hadiz, Vedi. R. 2005. *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Pasca-Soeharto*. Jakarta: LP3S.
- Haryanto, Ignatius. 2006. *Indonesia Raya Dibredel*. Yogyakarta: LKiS.
- Haryanto, Ignatius. 2008. *Propaganda, Kuasa, dan Pengetahuan: Genealogi Ilmu Komunikasi di Indonesia, (Suatu Penelusuran Awal)*.
- Hill, David. T. 2011. *Pers di Masa Orde baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Herlambang, Wijaya. 2013. *Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Heryanto, Ariel. 2004. "Intelektual Publik, Media, dan Demokratisasi: Politik Budaya Kelas-Menengah Indonesia" dalam Ariel Heryanto dan Sumit. K. Mandal (Eds), *Menggugat Otoriterisme di Asia Tenggara: Perbandingan dan Pertautan antara Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: KPG.
- Heryanto, Ariel. 2006. "Kiblat dan Beban Ideologis Ilmu Sosial Indonesia" dalam Vedy Hadiz dan Daniel Dhakidae (Eds), *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta-Singapore: Equinox Publishing.
- ISKI Semarang. 1987. *Perkembangan Ilmu Komunikasi di Indonesia dalam Kurun Waktu 1965-1985*. Kerjasama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Cabang Semarang.
- Kincaid, D. Lawrence & Schramm, Wilburr. 1977. *Asas-asas Komunikasi Antar Manusia*. Jakarta: LP3ES.
- Kleden, Ignas. 1986. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3ES.
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Perkembangan Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi*. Disampaikan dalam Lokakarya Pengembangan Program Studi Ilmu Komunikasi dan Desain Kompetensi DIKTI-ASPIKOM, Surakarta 2-3 Desember 2009.
- Lane, M. 2014. *Ingatan Revolusi, Aksi Massa, dan Sejarah Indonesia: Unfinished nation*. Yogyakarta: Penerbit Djaman Baroe.
- L'Etang, J., & Pieczka, M. 1997. *Critical Perspectives in Public Relations*. Boston: International Thomson Business Press.

- L'Etang, J. 2005. "Critical Public Relations: Some Reflections." *Public Relations Review* Vol. 31 (4): 521-526.
- Levine, David. 1969. "History and Social Structure in The Study of Contemporary Indonesia". *Indonesia*, 9.
- Lim, Merlyna. 2012. "The Leuge of Thirteen: Media Concentration in Indonesia". *Journal of Communication* 62 (2).
- MacDougal, John James. 1986. "The Technocratic Model of Modernization: The Case of Indonesia's New Order", *Asian Society* Vol 16 (II): 66-83.
- McVey, Ruth dan Anderson, Benedict, 1971. *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia*. Ithaca: Modern Project Cornell University.
- Mulyana, Deddy. 2010. *50 Tahun Fikom-Kilas Balik, Kekinian dan Impian: Pidato pada Dies Natalis ke-50 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran*. Bandung: Fikom Unpad.
- Morfit, Michael. 1981. "Sistem Penelitian Ilmu Sosial", *Majalah Prisma*, 10.
- Mosco, V. 2009. *The Political Economy of Communication*. Los Angeles: Sage Publications.
- Narwaya, Tri Guntur. 2006. *Matinya Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Resist Book.
- Nugroho, Heru. 2006. "Ekonomi Politik Pendidikan Tinggi: Universitas Sebagai Arena Perebutan Kekuasaan" dalam Vedy Hadiz dan Daniel Dhakidae (Eds), *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta-Singapore: Equinox Publishing.
- Nugroho, Yanuar. Putri, Dinita Andriani. Laksmi, Shita. 2012. *Mapping the Landscape of the Media Industry in Contemporary Indonesia*, Jakarta: Ford Foundation.
- Oetomo, Dede. 2007. "Militer(Isme), Intelektual dan bahasa Politik Indonesia" dalam Baskara. T. Wardaya(Ed), *Menelusuri Akar Otoritarinisme Indonesia*, Jakarta: Elsam.
- Putra, I G. N., 1996, *Public Relations Practice in Indonesia: A Case Study of a Commercial Television Station and a State University*. Thesis MA tidak diterbitkan, University of Canberra, Australia.
- Rahardjo, Turnomo. 2012. "Keseragaman Atau Keberagaman: Gagasan Alternatif untuk Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi di Indonesia" dalam Setio Budi (Ed), *Communication Review: Catatan Tentang Pendidikan Komunikasi di Indonesia, Jerman dan Australia*, Yogyakarta: Buku Litera.
- Robison, Richard. 2013. *Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Roosa, J. 2008. *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia.
- Samuel, Henneman. 2010. *Genealogi Kekuasaan Ilmu Sosial Indonesia: Dari Kolonialisme Belanda hingga Modernisme Amerika*. Jakarta: Kepik Ungu.
- Shirasihi, Saya Sasaki. 2009. *Pahlawan-Pahlawan Belia, Keluarga Indonesia dalam Politik*. Jakarta: Nalar.
- Siegel, James T. 2000. *Penjahat Gaya (Orde) Baru: Eksplorasi Politik dan Kejahatan*. Yogyakarta: LKIS.
- Sudibyo, Agus. 2004. "Absennya Pendekatan Ekonomi Politik untuk Studi Media" dalam Nunung Prajarto (Ed), *Komunikasi, Negara dan Masyarakat*. Yogyakarta: FISIPOL UGM.
- Susanto, S. Astrid. 1974. *Komunikasi dalam Teori dan Praktek jilid II: Komunikasi Pembangunan dan Masalahnya*. Bandung: Binacipta.
- Susanto, S. Astrid. 1976. *Filsafat Komunikasi*. Bandung: Binacipta.
- Susanto, S. Astrid. 1977. *Komunikasi Kontemporer*. Bandung: Binacipta.

Susanto, S. Astrid. 1980. *Komunikasi Sosial di Indonesia*. Bandung: Binacipta.

Susanto, S. Astrid. 1984. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: Binacipta.

Sendjaja, Djuarsa S. 2006. *Ilmu Komunikasi di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam rangka Pembukaan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta Juli. 2006.

Tirtosudarmo, Riwanto. 2007. *Perkembangan Ilmu-Ilmu Sosial: Sebuah catatan perjalanan dalam Mencari Indonesia Demografi-Politik Pasca-Soeharto*. Jakarta: LIPI&YOI.

Utami, Ayu. Hasibuan. Imran, Santoso. Siregar, Liston, P (Eds). *Bredel 1994: Kumpulan Tulisan Tentang Pembredelan Tempo, Detik, Editor*. Jakarta: Aliansi Jurnalistik Indonesia.

Wertheim, W.F, 1970. "Suharto and the Untung Coup - the Missing Link", *Journal of Contemporary Asia* 1(2).